

2022



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 16 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,



WISNUWARDHANA, ST., MT
NIP. 19711024 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Perjanjian Kinerja.....	7
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Perbaikan Kedepan	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum.....	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
Tabel 3. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	10
Tabel 4. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	14
Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	15
Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya (2021).....	19
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka Menengah yang Terdapat dalam Perencanaan Strategis.....	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	28
Tabel 9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	32
Tabel 10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2021).....	35

BAB 1	PENDAHULUAN
------------------------	--------------------

1.1 Latar Belakang

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta dalam rangka mewujudkan Good Government, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021- 2026.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor faktor kunci keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk pertanggungjawaban kepada pejabat dan publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas perbantuan sesuai bidang tugasnya.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas bidang pekerjaan umum;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya layanan infrastruktur Dinas PU	Rasio Kemantapan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan berdasar SK jalan.
			Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan belum sepenuhnya dapat mencapai target yang diharapkan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang masih relatif terbatas anggarannya
			Tingkat laju kerusakan jalan setiap tahun yang cenderung meningkat karena pengaruh struktur tanah yang labil
2		Bangunan Negara yang layak fungsi	Jumlah bangunan negara yang belum memenuhi syarat SLF (Sertifikat Layak Fungsi) Permen PUPR No.27/PRT/M/2018
			Belum adanya data base yang valid bangunan negara yang tercatat sebagai asset daerah
			Belum efektifnya pengawasan gedung negara
3		Rasio tenaga kerja kontruksi yang terlatih	Kurangnya tenaga aksesor dan tenaga terampil yang dilatih
			Minimnya data system data informasi jasa konstruksi
4		Rasio daerah irigasi yang kondisi baik	Minimnya Penyediaan air baku untuk irigasi pertanian
			Belum adanya Perda tentang (Jalur Hijau)
			Belum optimalnya pemanfaatan void eks tambang
			Peningkatan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya masih

			belum mencapai target yang diharapkan
			Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan jaringan irigasi
5		Kompetensi SDM dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar	Kurangnya pelatihan teknis dan administrasi bagi ASN DPU
			Masih lemahnya tingkat disiplin ASN DPU
			Kurangnya apresiasi terhadap ASN yang berkinerja baik

Isu Strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan infrastruktur lima tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Pembangunan ibukota Negara di Kalimantan Timur;
2. Kesenjangan pembangunan infrastruktur;
3. Perubahan iklim global;
4. Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi prioritas pembangunan sektor pertanian (food estate);
5. Belum terbangun dan tersedianya beberapa fasilitas infrastruktur layanan publik
6. Terbatasnya kompetensi SDM

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dibantu oleh :

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Bina Marga;
3. Kepala Bidang Cipta Karya;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
5. Kepala Bidang Teknis.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pada Lampiran 1

1.5.1 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data kondisi terakhir sebanyak 435 orang dengan rincian 342 orang berstatus ASN, dan 85 orang berstatus Non ASN

Untuk komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

ASN OPD DPU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOLONGAN	PEJABAT STRUKTURAL	JENIS KELAMIN
342	SD : 4	Juru Muda (I/a) : -	Eselon II/b : 1	Laki-laki : 225
	SLTP : 1	Juru Muda Tk.I (I/b) : -	Eselon III/a : 1	Perempuan : 117
	SLTA : 208	Juru (I/c) : 1	Eselon III/b : 4	
	D1 : -	Juru Tk.I (I/d) : 3	Eselon IV/a : 2	
	DII : -	Pengatur Muda (II/a) : 1	Eselon IV/b : -	
	DIII : 10	Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 7	JFU : 12	
	S1 : 100	Pengatur (II/c) : 46	Pelaksana : 322	
	S2 : 19	Pengatur Tk.I (II/d) : 153		
	S3 : -	Penata Muda (III/a) : 17		
		Penata Muda Tk.I (III/b) : 24		
		Penata (III/c) : 26		
		Penata Tk.I (III/d) : 50		
		Pembina (IV/a) : 13		
		Pembina Muda Tk.I (IV/b) : 1		
		Pembina Tk.I (IV/c) : -		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per Desember 2022

BAB 2	PERENCANAAN KINERJA
------------------	--------------------------------

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Satuan	Target 2022	Keterangan
1	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persentase meningkatnya aksesibilitas jalan kabupaten	Persentase	88,89	
2	Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalm Kondisi Baik	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Persentase	62,20	
3	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persentase	89,32	Kewenangan Disperkim
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	89,32	Kewenangan Disperkim
4	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Indeks layanan infrastruktur sumber daya air	Indeks	0,39	
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	14	
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	688	

		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase	100	
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	
6	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persentase	100	
7	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	
8	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	91.000.000,00	

Adapun Penetapan Kinerja yang menjadi penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	M ²	248,153
		Panjang jalan yang dibangun	Km	6,949
		Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	Km	1,743
		Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Km	58,384
		Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	Dokumen	2
		Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	8,440
		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Km	6,671
		panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	0,50
		Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	M	180
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	Dokumen	12
		Panjang jembatan yang dibangun	M	99
		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	M	51
		Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	M	3,320
		Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi / terekonstruksi akibat bencana	M	20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

2	Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	Unit/Kawasan	10
		Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	6
		Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	100
		Tersedianya data standar harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan	Buku	1
3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	20,350
		Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	76
		Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	0
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	150
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	1
		Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	14
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	688
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persentase	100
6	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
7	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	91,000,000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 sebesar 100%. merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	M ²	248,153	111,344.23	44,87	Sangat Rendah
		Panjang jalan yang dibangun	Km	6,949	7,751	112	Sangat Tinggi
		Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	Km	1,743	1,7180	99	Sangat Tinggi
		Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Km	58,384	62,880	108	Sangat Tinggi
		Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi
		Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	8,440	6,0415	71,58	Sedang
		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Km	6,671	6,6705	100	Sangat Tinggi
		panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	0,50	0,50	100	Sangat Tinggi
		Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	M	180	70	38,89	Sangat Rendah
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	Dokumen	12	11	91,67	Sangat Tinggi

		Panjang jembatan yang dibangun	M	99	49	49,49	Sangat Rendah
		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	M	51	30	58,82	Rendah
		Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	M	3,320	3,320	100	Sangat Tinggi
		panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana	M	20	40	200	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	Unit / Kawasan	10	9	90,00	Tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	6	100	Sangat Tinggi
		Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tersedianya data standar harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan	Buku	1	1	100	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	20,350	12,348.53	60,68	Rendah
		Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	76	4,90	6,45	Sangat Rendah
		Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	0	0	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	150	124	82,67	Tinggi
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	1	1	100	Sangat Tinggi
		Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	14	19	136	Sangat Tinggi
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	688	0	0	Sangat Rendah
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi

		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	C (Kurang) 42,86	61.23	Rendah
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	91,000,000	937,190,000	1030	Sangat Tinggi

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Satuan	Thun 2021			Thun 2022		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	M ²	72,720	72,717.78	100	248,153.410	111,344.23	44,87
		Panjang jalan yang dibangun	Km	21,70	21,70	100	6,949	7,751	112
		Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	Km	0	0	0	1,743	1,718	99
		Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Km	0	0	0	58,384	62.880	108
		Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	Dokumen	2	2	100	2	2	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

		Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	8,344	8,344	100	8,44	6,0415	71,58
		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Km	0	0	0	6,6705	6,6705	100
		panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	0,100	0,100	100	0,50	0,50	100
		Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	M	646	646	100	180	70	38,89
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	Dokumen	0	0	0	12	11	91,67
		Panjang jembatan yang dibangun	M	40	40	100	99	49	49,49
		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	M	0	0	0	51	30	58,82
		Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	M	0	0	0	3320	3320	100

		Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi / terekonstruksi akibat bencana	M	0	0	0	20	40	200
2	Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalm Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	Unit / Kawasan	5	5	100	10	9	90,00
		Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100	6	6	100
		Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	1	1	100	100	100	100

		Tersedianya data standar harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan	Buku	1	1	100	1	1	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	12,093.00	12,093.00	100	20350	12,348.53	60,68
		Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	14,813.60	14,813.60	100	76	4,90	6,45
		Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	358	358	100	0,4	0,4	100
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	0	0	0	150	124	82,67
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	0	0	0	1	1	100

		Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	24	24	100	14	19	136
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	688	0	0	688	0	0
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase	100	100	100	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	100	100	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persentase	100	100	100	100	100	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Cukup (C) 31	44.29	Baik (B) 60-70	C (Kurang) 42,86	61,23
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100
6	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	n.a	n.a	n.a	1	1	100
7	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	91,000,000.00	3,449,265,000.00	3790	91,000,000.00	937,190,000.00	1030

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
1	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Luas lahan/tanah yang dibebaskan	Ha	39,70	111.344,23	44,87
		Panjang jalan yang dibangun	Km	2.193,02	7,751	112
		Panjang jalan yang memiliki lebar dibawah standar	Km	3,60	1,7180	99
		Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Km	78,66	62,880	108
		Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan	Dokumen	2	2	100
		Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	724,02	6,0415	71,58
		Panjang jalan yang di pemelihara secara berkala	Km	834,80	6,6705	100
		Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	555,54	0,50	100
		Jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat	Unit	22	87	38.89
		Jumlah dokumen pengembangan jalan dan jembatan	Dokumen	5	11	91,67
		Jumlah jembatan yang dibangun	Unit	235	49	49,49
		Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan	Unit	27	51	58.82

		Jumlah jembatan dalam kondisi runtuh dan kondisi kritis	Unit	7	29	100
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Unit	31	162	
		Jumlah jalan dan jembatan yang terdampak bencana	Unit	n.a	n.a	n.a
2	Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung yang dipelihara dan rawat	Unit	0	9	100
		Jumlah dokumen sistem penataan bangunan dan lingkungan	Dokumen	0	6	6
		Jumlah dokumen IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Dokumen	0	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	0	12.348,53	60,68
		Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	75	4,90	6,45
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	0	124	82,67
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	0	1	100

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan yang tepat sasaran;
- Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan;

- Terjalannya koordinasi yang baik antar bidang dalam OPD;

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terkendalanya pelaksanaan kegiatan oleh rekanan dalam mengefisienkan waktu, sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu;
- Adanya kendala yang disebabkan oleh fenomena alam dan perubahan iklim serta curah hujan yang cukup tinggi, banjir, longsor yang berakibat terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
- Kurangnya jumlah SDM yang menguasai secara teknis pada bidang yang ditangani

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara periodic, show case meeting secara berjenjang;
- Perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan/workshop dan selalu memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan peraturan terbaru.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan keluaran (output) yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 8

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Dimana Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh 7 program dan 17 kegiatan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Unit	30	30	100
Meningkatnya Kualitas Sistem Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi		Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	150	124	82,67
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	1	1	100

		Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha	20	17	85
Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	0,40	0,40	100
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	20,350	12,348.53	60,68
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	76	4,9	6,45
Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung					
		Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	100	100	100

		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	6	100
Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persentase Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Km	1344,34	1344,34	100

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa capaian kinerja program untuk setiap indikator sasaran rata – rata 90.28%. Program yang mempunyai realisasi rendah yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 787.715.596.164,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam RibuSeratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 654.082.095.006,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Rupiah)** atau sebesar **83,04 %**, rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 9.

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi angggaran sebesar 87,48%, rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 10 . Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 4,44% hal ini disebabkan karena kurang optimalnya serapan anggaran dikarenakan adanya penumpukan penagihan pada akhir tahun sehingga berpotensi menjadi utang.

Tabel 9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	68.747.081.051,00	59.831.303.039,00	87,03	8.915.778.012,00
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	475.201.000,00	168.945.930,00	35,55	306.255.070,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.083.276.240,00	52.057.187.457,00	88,11	7.026.088.783,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	362.516.216,00	324.075.500,00	89,40	38.440.716,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1.000.000.000,00	784.247.000,00	78,42	215.753.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.808.803.595,00	2.177.804.869,00	77,53	630.998.726,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	842.780.000,00	842.100.000,00	99,92	680.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.239.504.000,00	2.887.547.303,00	89,14	351.956.697,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	935.000.000,00	589.394.980,00	63,04	345.605.020,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.698.302.004,00	1.684.808.566,00	62,44	1.013.493.438,00

	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.698.302.004,00	931.359.566,00	54,84	766.942.438,00
	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	800.000.000,00	709.627.000,00	88,70	90.373.000,00
	Jumlah izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) yang sudah diterbitkan	Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200.000.000,00	43.822.000,00	21,91	156.178.000,00
Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur	Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.035.006.786,00	12.142.706.258,00	86,52	1.892.300.528,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	14.035.006.786,00	12.142.706.258,00	86,52	1.892.300.528,00
	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	128.218.884.000,00	91.033.745.271,00	71,00	37.185.138.729,00
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	87.834.880.000,00	60.478.846.933,00	68,86	27.356.033.067,00
	Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.384.004.000,00	30.554.898.338,00	75,66	9.829.105.662,00
Meningkatnya Kondisi bangunan Negara dalam	Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan	Program Penataan Bangunan Gedung	8.713.127.689,00	5.836.743.545,00	66,99	2.876.384.144,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kondisi Baik	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	8.713.127.689,00	5.836.743.545,00	66,99	2.876.384.144,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100.613.926.172,00	86.424.371.837,00	85,90	14.189.554.335,00
	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	100.613.926.172,00	86.424.371.837,00	85,90	14.189.554.335,00
Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dibangun	Program Penyelenggaraan Jalan	464.689.268.462,00	397.128.416.490,00	85,46	67.560.851.972,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	464.689.268.462,00	397.128.416.490,00	85,46	67.560.851.972,00
Total			787.715.596.164,00	654.082.095.006,00	83,04	133.633.501.158,00

Tabel 10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	179.501.630.004,00	173.084.922.249,00	96,43	6.416.707.755,00
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.000.000,00	36.920.000,00	36,92	63.080.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	174.149.464.416,00	169.065.511.088,00	97,08	5.083.953.328,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	222.455.000,00	120.414.900,00	54,13	102.040.100,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	177.861.000,00	31.570.000,00	17,75	146.291.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.253.100,00	527.496.144,00	59,32	361.756.956,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.868.556.488,00	2.513.225.970,00	87,61	355.330.518,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.094.040.000,00	789.784.147,00	72,19	304.255.853,00

Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	420.000.000,00	415.032.000,00	98,82	4.968.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	420.000.000,00	415.032.000,00	98,82	4.968.000,00
	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	33.964.563.884,00	25.496.692.388,00	75,07	8.467.871.496,00
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	18.580.341.973,00	14.992.140.013,00	80,69	3.588.201.960,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.384.221.911,00	10.504.552.375,00	68,28	4.879.669.536,00
Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah Bangunan gedung Negara kondisi dibangun/ditingkatkan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	98.202.787.928,00	91.838.294.881,00	93,52	6.364.493.047,00
		Penyelenggaraan Pentaan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	98.202.787.928,00	91.838.294.881,00	93,52	6.364.493.047,00
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	240.265.675.290,00	192.341.108.740,00	80,05	47.924.566.550,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	240.265.675.290,00	192.341.108.740,00	80,05	47.924.566.550,00
Total			552.354.657.106,00	483.176.050.258,00	87,48	69.178.606.848,00

BAB 4	PENUTUP
----------	---------

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 rata-rata sebesar 90.28%. (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Unit	30	30	100
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	150	124	82,67
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	1	1	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha	20	17	85
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	0,40	0,40	100
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	20,350	12,348.53	60,68
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	76	4,9	6,45
Program Penataan Bangunan Gedung					
Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	100	100	100
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	6	100
Program Penyelenggaraan Jalan					
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Km	1344,34	1344,34	100

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 83,04% menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum sebesar 87,48% atau terjadi penurunan sebesar 4,44% hal ini dikarenakan kurang optimalnya serapan anggaran sebagai akibat dari penumpukan penagihan di akhir tahun.

4.2 Perbaikan Kedepan

1. Perlu ditingkatkannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara periodic, show case meeting secara berjenjang;
2. Perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan/workshop dan selalu memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan peraturan
3. Diperlukan gedung laboratorium, peremajaan peralatan alat berat dan pelatihan penggunaan alat dan laboratorium mengenai uji laboratorium pada bidang jasa konstruksi.
4. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 16 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,


WISNUWARDHANA, ST., MT
NIP. 19711024 200012 1 001

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Alamat Kantor

**Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati
Kutai Kartanegara 75511**

**Email : dpu@mail.kukarkab.go.id, Website :
<http://www.dpukukar.com>**